

## POLITIK BAHASA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

**EDO GALIH PERMADI**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [edogalihpermadi@gmail.com](mailto:edogalihpermadi@gmail.com)

**Sri Mastuti Purwaningsih**

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang sejarah yang begitu panjang. Berbagai bentuk peristiwa sejarah dan perjuangan para tokoh pergerakan di setiap masa mewarnai perkembangan bahasa nasional ini. Begitu pula pada masa pendudukan Jepang yang merupakan titik balik perkembangan bahasa Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk politik bahasa yang dijalankan oleh Jepang di Indonesia jika dilihat melalui teori *Language Planning*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Langkah awal yaitu mengumpulkan sumber-sumber terkait tentang kebijakan politik bahasa yang dilakukan oleh Jepang, sumber primer didapat dari majalah Kanpo dan surat kabar yang terbit pada masa pendudukan Jepang. Sedangkan sumber sekunder didapat dari buku-buku, tesis dan jurnal online mengenai politik bahasa di masa pendudukan Jepang. Sumber yang telah dikumpulkan kemudian dipilah dan disusun untuk mempermudah penafsiran sumber sejarah. Selanjutnya dicari keterkaitan antara sumber – sumber primer dan sekunder yang sesuai dengan tema penelitian. Tahap terakhir adalah historiografi yang menjadi hasil rekonstruksi semua fakta sejarah sesuai dengan tema penulisan sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang memberlakukan politik bahasa di Indonesia dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia serta menyebarkan bahasa Jepang. Politik bahasa yang dilakukan oleh Jepang tersebut termasuk kedalam kebijakan *Language Planning*. Jepang juga memanfaatkan bahasa daerah untuk menyebarkan bahasa Jepang dan memobilisasi masyarakat daerah yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Tujuan Jepang memberlakukan politik bahasa yakni agar mempermudah Jepang dalam berkomunikasi dengan bangsa Indonesia yang memiliki bermacam – macam bahasa lokal dan menghilangkan pengaruh bahasa Belanda di Indonesia. Kebijakan Jepang ini membawa perubahan dalam perkembangan bahasa Indonesia. Politik bahasa pemerintah Jepang memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan menggantikan kedudukan bahasa Belanda yang sebelumnya menjadi bahasa kelas sosial atas.

**Kata Kunci:** politik bahasa, *Language Planning*, masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa daerah

### Abstract

*Indonesian Language is a national language of Indonesian which have a long historical background. There were many historical event and movement leaders' struggle in every period accompanying this national language's development. Likewise during Japanese occupation period which is the turning point of Indonesian language's development.*

*The purpose of this research are to know how was the form of Language Planning applied by the Japanese in Indonesia when seen through the theory of Language Planning. This research was using the method of historical research. The first step was gathering the relevant sources of language politic conducted by the Japanese. Primary sources was obtained from Kanpo and newspapers published during the Japanese occupation. While the secondary sources was obtained from books, theses and online journals regarding the language politic during the Japanese occupation. Sources that have been collected then sorted and arranged afterwards to facilitate the interpretation of historical resources. Next is searching the link between the primary and secondary sources that match the theme of research. The last step was historical writing based on the result of reconstructing all historical facts in accordance with the theme of the historical writing.*

*The result shows that the Japanese enforced the language politic in Indonesia to prohibit the use of the Dutch language and obligate the use of Indonesian language as well as spreading the Japanese language. Language politic*

conducted by the Japanese was included into the Language Planning policy. Japan also used the local language to spread the Japanese language and mobilized the local communities who didn't know the Indonesian language yet. The objectives of the Japanese when enforced the language politic was in order to facilitate communication with the Indonesian people, which has wide variety of local languages and eliminate the influence of Dutch language in Indonesia. This Japanese's Policy had bring a change in the development of Indonesian language. Japanese' language politic had strengthen the position of Indonesian language as the national language and replaces the previous position of Dutch language as the language of the first class people.

**Keywords :** *language politic, Language Planning, Japanese occupation period, Indonesian language, Japanese language, local language*

## PENDAHULUAN

Masa penjajahan Jepang selama tiga setengah tahun merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Sebelum serbuan Jepang, tidak ada satu pun tantangan yang serius terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia.<sup>1</sup> Dengan mudahnya, Jepang mampu merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Satu per satu tempat strategis yang ada di Nusantara berhasil direbut Jepang dari tangan Belanda. Tarakan merupakan wilayah Nusantara yang pertama kali jatuh ke tangan Jepang, yakni pada tanggal 12 Januari 1942. Akhirnya perlawanan Belanda terhadap serangan Jepang pun berakhir dengan ditanda-tanganinya perjanjian Kalijati oleh pihak Belanda dan Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 yang juga menandakan dimulainya masa pendudukan Jepang.

Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah oleh Jepang. Sumatera ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke 25, sedangkan Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat ke 16; kedua wilayah ini berada di bawah Angkatan Darat Wilayah ke 7 dengan markas besarnya di Singapura. Kalimantan dan Indonesia Timur dikuasai oleh Angkatan Laut. Kebijakan di wilayah-wilayah tersebut sangat berbeda. Pada umumnya, Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju namun secara ekonomi kurang penting; sumber dayanya yang utama adalah manusia. Kebijakan-kebijakan Jepang di sana membangkitkan rasa kesadaran nasional yang jauh lebih mantap dari pada di kedua wilayah lainnya, dan dengan demikian semakin memperbesar perbedaan tingkat kecanggihan politik antara Jawa dan daerah-daerah lainnya.<sup>2</sup>

Kemenangan balatentara Jepang terhadap penjajah Belanda, pada mulanya disambut hangat dan bahagia oleh semua rakyat Indonesia. Mereka bangga karena kemenangan Jepang adalah kemenangan bangsa Timur terhadap bangsa Barat. Mitos yang menyatakan bahwa bangsa Barat selalu lebih unggul dari bangsa Timur telah hilang dari pikiran mereka. Namun lama-kelamaan niat Jepang yang sesungguhnya pun mulai terlihat. Peraturan-peraturan yang mengekang kebebasan rakyat Indonesia pun mulai bermunculan. Janji-janji manis yang pernah mereka ucapkan pada rakyat Indonesia pun mulai terlihat kebohongannya. Tak cukup sampai disitu, mereka juga

menerapkan perlakuan-perlakuan kasar dan keji terhadap rakyat Indonesia

Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas: menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan mereka dan memobilisasi mereka demi kemenangan Jepang.<sup>3</sup> Dalam upayanya untuk menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, Jepang melakukan berbagai cara. Salah satu cara tersebut adalah pelarangan penggunaan bahasa Belanda dan sebagai gantinya adalah penggunaan bahasa Jepang. Sedikit yang menguasai bahasa Jepang, sehingga bahasa Indonesia menjadi sarana bahasa yang utama untuk propoganda dan dengan demikian, statusnya sebagai bahasa nasional menjadi semakin kokoh.<sup>4</sup>

Saat Jepang menduduki Indonesia, Jepang terpaksa menumbuhkan bahasa Indonesia dengan cepat agar segala urusan pemerintahan, ekonomi, pengajaran, perhubungan, dan sebagainya dapat berjalan dengan lancar. Bagi masyarakat Indonesia hal itu berarti suatu revolusi yang sangat besar, karena dalam waktu yang singkat pejabat-pejabat dalam segala lapangan dengan cepat harus beralih dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

Pelaksanaan peraturan ini berjalan dengan lancar dan semua kalangan rakyat Indonesia sangat mematuinya. Hal ini disebabkan ketegasan dan kekejaman Jepang yang tidak segan dalam menghukum para pelanggar. Pemaksaan tersebut sangat efektif dalam menghapus penggunaan bahasa Belanda. Beberapa tokoh pergerakan juga menggunakan peraturan ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan bahasa Indonesia.

Keharusan penggunaan bahasa Indonesia yang dicanangkan Jepang merupakan kebijakan yang bisa dibilang membawa keuntungan bagi Jepang dan masyarakat Indonesia. Bagi Jepang, peraturan ini akan memudahkan Jepang dalam menjalankan pemerintahan pendudukan di Indonesia yang harus dijalankan dengan cepat sehingga dapat membantu jalannya peperangan. Jepang hanya perlu mempelajari satu bahasa untuk dapat melancarkan komunikasi dalam pelaksanaan kekuasaannya serta menghapus pengaruh-pengaruh Belanda yang saat itu masih kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu Jepang juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai media propaganda sehingga membantu Jepang dalam

<sup>1</sup> M.C. Ricklefs, 2010, *Sejarah Indonesia Modern*, Jakarta : Serambi, hlm. 421.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 421-422.

<sup>3</sup> M.C. Ricklefs, *Op Cit*, hal. 425

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 427

<sup>5</sup> S. Takdir Alisjahbana, 1957, *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Rakyat, hlm. 125

memobilisasi rakyat Indonesia untuk kepentingan perang Jepang.

Bagi bangsa Indonesia, keharusan penggunaan bahasa Indonesia telah merangsang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sebelumnya dengan berbagai cara dicegah oleh Belanda agar tidak menjadi bahasa persatuan, oleh Jepang dijadikan sebagai satu-satunya bahasa pengantar.

Berbagai upaya juga dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia, seperti menyempurnakan perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia serta menghimbau rakyat Indonesia tentang betapa pentingnya bahasa Indonesia dan kewajibannya untuk senantiasa menggunakannya sebagai bahasa persatuan.

Hal yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul politik bahasa pada masa pendudukan Jepang adalah meluasnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai dampak dari peraturan Jepang yang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia merupakan sebuah identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bahkan sebelum datangnya Jepang dan penerapan politik bahasa Jepang. Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam etnis dan bahasa daerah. Bangsa Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agar dapat berkomunikasi satu sama lain dan nantinya bahasa Melayu inilah yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia.

Setelah melalui perkembangan yang panjang, bangsa Indonesia telah sampai pada sebuah kesepakatan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini diwujudkan dalam Kongres Pemuda I di tahun 1926 dan Kongres Pemuda II di tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Namun perkembangan bahasa Indonesia tak cukup sampai di situ. Banyak rintangan yang menghalangi berkembangnya bahasa persatuan ini.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan berbagai upaya mencegah berkembangnya kedudukan bahasa Indonesia di Hindia Belanda. Untuk situasi formal, khususnya dalam hal administrasi, bahasa Belanda wajib digunakan, sedangkan untuk bahasa sehari-hari pribumi menggunakan bahasa daerah masing-masing. Pada masa itu Bahasa Indonesia, yang dahulu adalah bahasa Melayu, digunakan sebagai bahasa pengantar lintas suku bagi para pribumi. Meskipun sejak dahulu digunakan sebagai bahasa pengantar, tetap saja kedudukan bahasa Indonesia masih berada di bawah bahasa Belanda yang merupakan bahasa pemerintah.

Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia baru memiliki kesempatan untuk berkembang kedudukannya. Bangsa Jepang yang ingin menghapus pengaruh dari Belanda, meninggikan derajat bahasa Indonesia dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia. Kebijakan Jepang ini merupakan sebuah politik bahasa. Ini lah yang menjadikan masa pendudukan Jepang menarik untuk dikaji karena pada masa itu bahasa

Indonesia berkembang pesat dan mulai kuat kedudukannya dalam bangsa Indonesia.

Tidak adanya tulisan sejarah yang khusus membahas perkembangan bahasa Indonesia pada masa Jepang dan politik bahasa yang dilakukan oleh Jepang adalah hal yang menjadi kekurangan dalam kesejarahan Indonesia. Padahal sangat perlu untuk menulis sejarah perkembangan bahasa Indonesia dalam setiap zaman, khususnya pada masa pendudukan Jepang, mengingat bahwa bahasa Indonesia adalah identitas dari bangsa Indonesia dan masa Jepang adalah masa yang penting dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia karena masa ini adalah titik balik bagi perkembangan bahasa Indonesia.

Tema ini sangat menarik karena mengungkap bagaimana peraturan Jepang yang melarang penggunaan bahasa Belanda membawa keuntungan bagi Jepang dan masyarakat Indonesia sekaligus. Di satu sisi peraturan ini dapat menghilangkan pengaruh Belanda dan mempermudah memobilisasi rakyat Indonesia, di sisi lain peraturan ini membantu mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saat Jepang menyerah, kedudukan bahasa Belanda sebagai bahasa formal yang penting telah jatuh dan digantikan oleh bahasa Indonesia. Penulis berusaha mengupas bagaimana Jepang menerapkan politik bahasa ini di Indonesia dengan permasalahan bagaimana bentuk politik bahasa yang dijalankan oleh Jepang di Indonesia?

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi tentang kebebasan penggunaan bahasa Indonesia pada masa Jepang ini adalah metode sejarah. Dalam sistem keilmuan, metode merupakan seperangkat prosedur, alat atau *piranti* yang digunakan (sejarawan) dalam tugas meneliti dan menyusun sejarah. Gilbert J. Garraghan menyatakan bahwa yang dimaksud metode sejarah ialah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis, dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam pengumpulan sumber, penilaian secara kritis terhadapnya, kemudian menyajikan sebagai sintesis, biasanya dalam bentuk tertulis.<sup>6</sup>

Pada tahap awal penelitian, penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang terkait dengan penggunaan Bahasa Indonesia dan peraturan Jepang yang melarang penggunaan Bahasa Belanda, baik berupa artikel dan berita dari koran-koran dan majalah sejarahan, maupun buku-buku yang membahas tentang Indonesia pada masa pendudukan Jepang.

Setelah sumber dibaca dilakukan pengkategorian sumber berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah Jepang mengenai pelarangan bahasa Belanda dan keharusan penggunaan bahasa Indonesia, perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai aspek dan berita-berita lain mengenai politik bahasa pada masa pendudukan Jepang. Penulis juga mencari keterkaitan antar sumber yang akan diteliti, sehingga dapat ditetapkan sebagai sumber utama atau sumber

<sup>6</sup> Aminuddin Kasdi, 2005, *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa University Press, hlm. 10

pendukung, dan sumber-sumber lainnya. Langkah terakhir yaitu fakta yang telah ditafsirkan ditulis dalam bentuk karya tulis.

Penelitian ini menganalisis politik bahasa yang dijalankan oleh Jepang dengan menggunakan teori *Language Planning*. *Language Planning* (Perencanaan Bahasa) adalah suatu aktivitas mempersiapkan sebuah ortografi, tata bahasa, dan kamus yang normatif untuk panduan para penulis dan pembicara dalam suatu komunitas bahasa yang non-homogen.<sup>7</sup> *Language Planning* selalu digunakan saat ada masalah tentang bahasa. Jika terdapat ketidakpuasan dalam suatu situasi linguistik, *Language Planning* selalu memiliki ruang untuk dijalankan.

*Language Planning* menawarkan sebuah program aksi, yang dianalisis ke dalam sebuah tujuan, sebuah kebijakan atau sepaket kebijakan-kebijakan yang diyakini akan menuntun perencana bahasa / pemerintah ke tujuan dan prosedur yang spesifik yang akan mengimplementasikan kebijakan tersebut. *Language Planning* dibedakan ke dalam “Normalisasi” dan “Kultivasi” : “Normalisasi” membutuhkan bentuk “Seleksi” dan “Kodifikasi”, sedangkan “Kultivasi” membutuhkan fungsi “Pengembangan” dan “Penyebaran”.<sup>8</sup> Bentuk *Language Planning* ini sebelumnya telah ditulis dalam esai buatan Ivar Aasen di tahun 1836. Ivar Aasen adalah seorang pembaharu linguistik asal Norwegia yang ingin menerapkan *Language Planning* di negaranya karena situasi Norwegia pada saat itu memiliki berbagai jenis bahasa yang beredar di masyarakat, sama seperti di Indonesia.

Prosedur “Seleksi” yang dilakukan Ivar Aasen yakni dipandu oleh kebijakannya membuat bahasa rakyat sebagai standarnya. Ini berarti bahwa dia tidak dapat mendasarkan pada suatu dialek, sebagaimana yang telah dilakukan sebagian besar program-program *Language Planning*, baik itu dari suatu elit sosial maupun dari suatu daerah khusus.<sup>9</sup> Ivar Aasen menganggap bahwa bahasa yang digunakan sebagai bahasa utama dalam *Language Planning* tersebut tidak seharusnya berasal dari salah satu bahasa lokal. Bahasa lokal hanyalah sebagai bahasa pembanding untuk mengembangkan bahasa utama dalam *Language Planning* tersebut. Ivar Aasen juga memilih bahasa lokal yang tidak mendapatkan pengaruh dari bahasa – bahasa asing sebagai pembanding dalam mengembangkan bahasa utama.

Prosedur kedua, “Kodifikasi”, dilakukan oleh sebuah perhimpunan. Aasen menulis, “didirikan oleh orang-orang yang kompeten dalam perbahasaan”, contohnya ahli bahasa, yang seharusnya menerima glosarium, membuat perbandingan dan seleksi, serta menentukan norma, kemudian mereka memasukkan hal – hal tersebut ke dalam sebuah kamus Norwegia yang lengkap dan sebuah tata bahasa yang sesuai.<sup>10</sup> “Kodifikasi” dilakukan oleh ahli - ahli bahasa agar tercipta bahasa dengan susunan yang baku. Ivar Aasen

melakukan survey terhadap bahasa – bahasa lokal dan menulis perbandingan tata bahasa dari bahasa – bahasa lokal tersebut yang muncul di tahun 1848, yang kemudian diikuti dengan membuat sebuah kamus di tahun 1850. Setelah itu melakukan percobaan “Kodifikasi” norma – norma bahasa nasional menggunakan hasil perbandingan bahasa – bahasa lokal tersebut, yang kemudian diikuti dengan satu volume buku yang berisi tentang contoh – contoh bahasa di tahun 1853, sebuah buku tata bahasa definitif di tahun 1864, dan sebuah kamus di tahun 1873.

Selanjutnya adalah prosedur “Pengembangan” yakni prosedur untuk membuat bahasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat nasional di masa perkembangan teknologi dan literatur yang pesat.<sup>11</sup> Prosedur “Pengembangan” biasanya dilakukan dengan peminjaman dan imitasi dari bahasa lain. Aasen menganjurkan agar “Pengembangan” dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu kosa kata yang terdapat pada bahasa-bahasa lokal sebelum meminjam kosa kata dari bahasa asing.

Prosedur yang terakhir adalah “Penyebaran”. Aasen berpendapat bahwa bentuk bahasa baru ini seharusnya secara positif tidak diputuskan atau dipaksakan kepada siapapun, seseorang seharusnya menganjurkan pemakaiannya, namun di lain pihak mengizinkan semua orang memakai yang baru atau yang lama sesuai kemauannya.<sup>12</sup> Dalam prosedur “Penyebaran”, Aasen memilih untuk menyebarkan bahasa ini tanpa adanya pemaksaan dan polemik. Meskipun keputusan Aasen sangat lunak, hal ini mengakibatkan jangka waktu penyebaran bahasanya menjadi sangat lama.

## PEMBAHASAN

### Kebijakan *Language Planning* Jepang

Pada masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, Jepang menerapkan politik bahasa yang berupa kebijakan *Language Planning* di Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda serta memperluas penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang di Indonesia. Usaha Jepang untuk memastikan kebijakannya ini dapat berjalan dengan lancar juga tidak main-main. Jepang mengumumkan satu-persatu hal-hal apa saja yang diharuskan untuk menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, seperti merek, nama toko, surat, dan lain - lain. Ini dilakukan Jepang agar penduduk tidak melewatkan hal sekecil apapun dalam pelaksanaan peraturan ini. Prosedur - prosedur *Language Planning* yang dijalankan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang juga memiliki ciri yang sama dengan prosedur yang dilakukan oleh Ivar Aasen.

Alasan Jepang menerapkan kebijakan *Language Planning* yakni agar Jepang dapat dengan mudah memahami informasi-informasi dalam bahasa Indonesia. Jika Jepang tidak tegas memerintahkan penggunaan

<sup>7</sup> Einar Haugen, 1972, *The Ecology of Language*, California : Stanford University Press, hlm. 161

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 288

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 290

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 291

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 292

<sup>12</sup> Einar Haugen, *loc cit*

bahasa Indonesia, maka akan sulit bagi Jepang untuk berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia mengingat banyaknya jenis bahasa daerah dan logat yang ada di Indonesia.

Prosedur “Seleksi” adalah prosedur pemilihan bahasa lokal sebagai standar dalam penentuan bahasa nasional. Dalam menentukan bahasa perhubungan, Jepang tidak memilih bahasa Jawa ataupun bahasa Melayu dari suatu daerah sebagai bahasa perhubungan yang menggantikan bahasa Belanda. Jepang memanfaatkan bahasa Indonesia yang sebelumnya telah dijadikan sebagai bahasa nasional oleh tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Bahasa Indonesia ini juga memiliki bentuk yang berbeda dari bahasa-bahasa Melayu lainnya setelah mengalami berbagai pembaharuan.

Jepang melakukan pelarangan terhadap penggunaan bahasa Belanda sebagai bagian dari usahanya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Belanda di Indonesia. Pelarangan bahasa Belanda dan keharusan menggunakan bahasa Indonesia ini tidak hanya terbatas pada bahasa tutur, namun juga mencakup pada bahasa tulis. Berbagai peraturan yang melarang penggunaan bahasa Belanda diumumkan oleh Jepang melalui majalah ataupun surat kabar. Salah satu peraturan tersebut tertulis dalam majalah *Kanpo* tahun 1943.

“Sebagaimana oemoem telah mengetahoei, bahwa nama toko-toko, peroesahaan, demikian djuga dalam hal soerat menyoeat, pembitjaraan telpon dan pengiriman kawat, haroes ditoeis (dilakoekan) dalam bahasa Nippon atau Indonesia. Hal ini soedah ditetapkan oleh jang berwadajib. Oentoek penggantian nama-nama dalam bahasa jang telah ditentoeikan itoe, jang berwadajib djoega telah memberi kesempatan seloeasnja. Akan tetapi sampai pada saat ini masih djuga ada orang jang masih menggoenakan bahasa Belanda dan/ataoe Inggris, baik dalam pertjakapannja, soerat menyoeat maoepoen oentoek nama ataoe merek toko (peroesahaannja). Maka sekali lagi di sini diberi kesempatan kepada mereka jang beloem mengganti nama/merk, dan lain-lainnja itoe, dan selambat-lambatnja sampai tanggal 1 boelan 3 tahoen 2603, soepaya berboeat sebagaimana jang soedah ditentoeikan. Selandjoetnja, djika setelah tanggal jang terseboet di atas itoe masih terdapat djoega orang-orang jang memakai bahasa jang terlarang itoe, yakni Belanda dan/ataoe Inggris, maka mereka akan dianggap seolah-olah berlakoe sebagai moesoeh, demikian djoega peroesahaannja akan tergolong djoega kepoenyaaan moesoeh dan di sitoe pihak jang berwadajib akan bertindak terhadap mereka sebagai moesoeh djoega, sedang terhadap mereka akan diambil tindakan jang keras.”<sup>13</sup>

<sup>13</sup> *Kanpo, Makloemat : Tentang Memakainja Bahasa Nippon atau Indonesia*, no. 7, th. II, Febuari 1943, hlm. 19-20

Semua penduduk Indonesia, baik pribumi, Belanda maupun bangsa lainnya, diwajibkan untuk menaati peraturan ini dengan ancaman akan dianggap sebagai musuh dan ditindak keras oleh pihak yang berwajib. Ancaman dari Jepang ini bukanlah main-main mengingat ketegasan Jepang yang sudah sangat dikenal dalam menindak berbagai pelanggaran.

Penggunaan bahasa Indonesia ini bahkan diterapkan dalam setiap pertemuan – pertemuan penting antara tokoh – tokoh pergerakan dengan petinggi – petinggi balatentara Jepang. Dalam persidangan *Chuuu Sangi-In* contohnya, petinggi – petinggi Jepang menyampaikan perkataannya menggunakan bahasa Jepang yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitupun sebaliknya, tokoh – tokoh Indonesia menyampaikan perkataannya menggunakan bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang.<sup>14</sup> Balatentara Jepang tidak memaksa tokoh – tokoh Indonesia untuk menggunakan bahasa Jepang. Mereka menyadari bahwa bahasa Jepang belum banyak dikuasai oleh bangsa Indonesia, sehingga sebagai gantinya mereka mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia.

Kebijakan Jepang menyebarkan bahasa nasional dan bahasa Jepang ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di seluruh daerah jajahan Jepang. Di daerah lain, seperti di Filipina, Jepang juga berusaha mengangkat bahasa asli Filipina yakni bahasa Tagalog dan menyebarkan bahasa Jepang. Sebuah surat kabar memberitakan bahwa Lope Santos, pemimpin baru Sekolah Bahasa Kebangsaan Filipina memberi perintah pada seluruh pegawai agar menggunakan bahasa Tagalog dalam percakapan dan surat – menyurat. Lope Santos juga mengatakan pentingnya menggunakan bahasa Tagalog sebagai bahasa rakyat Filipina dan pentingnya menggunakan bahasa Jepang untuk seluruh bangsa Asia Timur.<sup>15</sup> Dengan menggunakan strategi semacam ini Jepang dapat menghilangkan pengaruh bahasa asing dengan menumbuhkan bahasa nasional di daerah jajahan tersebut, kemudian memanfaatkan rasa nasionalisme bangsa tersebut yang tumbuh seiring dengan tingginya kesadaran terhadap bahasa nasional untuk memobilisasi rakyatnya.

Selain bahasa Indonesia, Jepang juga memberitakan bahwa bahasa yang diperbolehkan untuk dipakai dalam tulisan di surat yang akan dikirim adalah bahasa Jepang, Indonesia, Jawa, Madura dan Sunda.<sup>16</sup> Jepang juga memberitakan bahwa pembicaraan dalam telpon harus menggunakan bahasa Jepang, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.<sup>17</sup> Pada masa pendudukan Jepang juga terdapat surat kabar – surat kabar yang menggunakan bahasa daerah seperti surat kabar *Madioen Syuu*.

<sup>14</sup> *Tjahaja, Persidangan Kedoea Tyuuoo Sangi-In*, no. 28, th. III, Senin 31 Januari 1944

<sup>15</sup> *Sinar Baroe, Menghidoepkan Bahasa Tagalog di Kalangan Rakjat Pilipina*, no. 354, th. II, Senin 30 Agustus 1943

<sup>16</sup> *Kanpo, Makloemat Kantor Pos*, no. 5, th. 1, Desember 1942, hlm. 4-5

<sup>17</sup> *Kanpo, Makloemat tentang Larangan Bitjara dengan Tilpon dengan Bahasa Inggris dan Belanda*, no. 3, th. I, Oktober 1942, hlm. 10

Berdasarkan teknik – teknik propaganda Jepang menurut Decker, pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional masuk ke dalam kategori Teknik Pengalihan (transfer). Teknik semacam ini adalah propaganda yang memanfaatkan wibawa, kesepakatan dan kehormatan sebagai sarana untuk memperkuat penerimaan masyarakat dalam propaganda. Dalam teknik ini biasanya berlaku sistem simbol, seperti bendera melambangkan bangsa. Simbol itu dipakai untuk mengobarkan perasaan – perasaan.<sup>18</sup>

Bahasa Indonesia digunakan oleh Jepang sebagai simbol untuk mengobarkan semangat dan rasa kehormatan rakyat Indonesia yang sebelumnya memiliki kedudukan dibawah bahasa Belanda. Dipilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga memberikan kesan bahwa Jepang memiliki niat baik untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Jepang berharap agar bangsa Indonesia semakin mendukung Jepang dan memiliki semangat untuk melawan kekuasaan Barat sehingga lebih mudah memobilisasi mereka demi kepentingan perang Jepang. Selain itu penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dapat menghapus pengaruh bahasa Belanda yang sangat kental dan mempermudah Jepang dalam berkomunikasi dengan rakyat Indonesia mengingat banyaknya bahasa-bahasa lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Prosedur “Kodifikasi” adalah prosedur yang dilakukan oleh ahli – ahli bahasa yang menerima glosarium (daftar kata - kata), membuat perbandingan dan seleksi bahasa – bahasa yang telah dipilih, menentukan norma – norma bahasa yang kemudian memasukkannya ke dalam kamus yang lengkap dan tata bahasa yang sesuai. Pada masa pendudukan Jepang, ada upaya untuk melakukan prosedur “Kodifikasi” ini. Sebenarnya, seperti juga pendapat A. Moeliono, Jepang turut menetapkan politik bahasa (garis haluan kebahasaan), sementara pihak Indonesia ditugaskan untuk mengurus dua sisi yang lainnya, yaitu pengembangan bahasa dan pembinaan bahasa.<sup>19</sup> Oleh sebab itu prosedur Kodifikasi dilakukan oleh bangsa Indonesia sementara Jepang mengawasi pelaksanaannya agar tidak ada yang bertentangan dengan kemauan Jepang.

Upaya kodifikasi tersebut dilakukan dengan pembentukan suatu panitia yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Kantor Pengajaran membentuk panitia penyempurnaan bahasa Indonesia yang bernama *Indonesiogo Seibu Iinkai* (Komisi Bahasa Indonesia) pada tanggal 20 Oktober 1942.<sup>20</sup>

Prosedur “Kodifikasi” ini juga diserahkan kepada ahli bahasa Indonesia yang ternama. Secara lengkap, struktur Komisi Bahasa Indonesia (*Indonesiogo Seibu*

*Iinkai*) terdiri dari : Pemimpin harian (T. Ichiki, Mr. Soewandi, St. Takdir Alisjahbana), Komisi Gramatika / Paramasastera (Prof. Hoesein Djajadiningrat (ketua), A. Soetan Pamuntjak, Sanoesi Pane, Mr. Soedjono, Y. Minami dan K. Soetan Pamuntjak), Komisi Bahasa Baru / penguji kata – kata baru (S. Mangoensarkoro (ketua), St. P. Boestami, T. Ichiki, Dr. Poerbatjaraka, Dr. Prijono, Ir. Soekarno, Prawiradinata dan H. Agus Salim), dan Komisi Kata – Kata Pengertian / kata – kata istilah (Moehammad Hatta (ketua), dr. Aulia, Armijn Pane, Ir. Tjokronolo, Soemanang, Soetardjo, St. Takdir Alisjahbana, Prof. K. Uyehara, Kagami dan Mr. Amir Sjarifuddin).<sup>21</sup>

Lebih lanjut, pada Komisi Kata – Kata Istilah terdapat seksi – seksi kecil yang melingkupi berbagai bidang dalam kehidupan dan keilmuan. Seksi – seksi kecil tersebut, yaitu : Seksi Kecil Dokter (Dr. Aulia, Dr. Bahder Djohan, K.St. Pamoentjak, Dr. Ramali, Dr. Soetomo Tjokronegoro), Seksi Kecil Keuangan (Mr. L. Hakimi, Moekti, Moetalib, Noegraha, Mr.R. Rem, Mr. Soedarisman), Seksi Kecil Kimia (Poernomo, Ir. Soerachman, Dr. Soetarman, Ir. Soedibio Tjokronolo), Seksi Kecil Ilmu Pasti dan Ilmu Fisika (H. Johannes, Ir. Sakirman, Ir. Soedibio Tjokronolo), Seksi Kecil Hukum (Oerip Adiwidjaja, Thalib Dalimoente, Katja Soengkana, Ny. Salijah, Mr. Samjono, Mr. R. Soenarjo), dan Seksi Kecil Rumah Tangga (Boediardjo, A. Chatib, E. Djajadiningrat, Djuweriah, Kartini, Moerdono, Murjati, Ruata, Suhadi, Suratmi).<sup>22</sup>

Komisi Bahasa Indonesia melakukan prosedur Kodifikasi dengan melalui berbagai tahapan. Menurut pendahuluan *Kamoes Istilah* (ditulis oleh Alisjahbana), tugas ahli – ahli terminologi KBI meliputi empat tahap, yaitu : 1) kerja perseorangan atau berkelompok antara anggota – anggota seksi kecil, 2) diskusi seksi kecil, 3) diskusi dalam rapat antar seksi, 4) pengambilan keputusan dalam sidang paripurna KBI yang dipimpin oleh direktur Kantor Pengajaran. Jadi secara resmi, semua keputusan harus diambil melalui Kantor Pengajaran. Akan tetapi, dalam sebuah teks kemudian (1978), Alisjahbana lebih merinci tahap – tahap pekerjaan KBI. Alisjahbana menekankan peran penting kantor bahasa yang dipimpinnya dan juga menyebut peran pihak luar, yakni : 1) para penerjemah dan guru mengumpulkan istilah – istilah yang mereka gunakan dalam sebuah bidang tertentu dan menyerahkannya kepada KBI, 2) tim kantor bahasa menyelaraskan peristilahan itu, memperbaiki dan melengkapinya, 3) peristilahan baru dikirimkan kepada guru – guru, 4) diskusi dengan para guru dan pakar bidang ilmu dalam rapat seksi kecil, 5) hasil kerja itu diajukan kepada anggota – anggota seksi peristilahan yang kemudian menyelaraskan hasil kerja seksi – seksi kecil, 6) daftar istilah ditetapkan dalam sidang paripurna.<sup>23</sup>

Melalui tahap – tahap dalam prosedur “Kodifikasi” yang dilakukan oleh Komisi Bahasa

<sup>18</sup> Yundi Fitrah, 1997, *Propaganda Jepang Dalam Cerpens Cerpens Majalah Djawa Baroe*, Depok : Prodi Ilmu Susastra Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya UI, hlm. 19

<sup>19</sup> Jerome Samuel, 2008, *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemoderan Kosakata dan Politik Peristilahan*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 199

<sup>20</sup> Kanpo, Makloemat : *Tentang Menyempurnakan Bahasa Indonesia*, no. 5, th. I, Desember 1942, hlm. 7

<sup>21</sup> *Pembangoen, Komisi Bahasa Indonesia*, no. 104, th. X, Rabu 21 Oktober 1942, hlm. 3

<sup>22</sup> Jerome Samuel, *op cit*, hlm. 209

<sup>23</sup> Jerome Samuel, *op cit*, hlm. 211 - 212

Indonesia, muncul berbagai istilah, norma – norma dan tata bahasa yang digunakan pada masa pendudukan Jepang. Hasil “Kodifikasi” bahasa Indonesia tersebut dapat dilihat pada kolom bahasa yang ada di surat kabar – surat kabar yang terbit pada masa pendudukan Jepang. Contoh istilah – istilah hasil “Kodifikasi” Komisi Bahasa Indonesia seperti *Agoeng* = besar dan terhormat, *bandel / membandel* = tidak peduli pada nasehat, *boeta hoeroef* = tidak pandai membaca dan menulis.<sup>24</sup> Sedangkan kamus hasil “Kodifikasi” Komisi Bahasa Indonesia baru diterbitkan pada tahun 1946 dan 1947 dengan judul *Kamoes Istilah* yang terbit dalam dua jilid (jilid I Asing – Indonesia dan Jilid II Indonesia - Asing) dan digunakan sebagai pedoman hingga tahun 1949.<sup>25</sup>

Upaya “Kodifikasi” tidak hanya terjadi pada bahasa Indonesia saja, tetapi juga pada bahasa Jepang dan bahasa daerah. Jepang melalui Kantor Pengajaran melakukan “Kodifikasi” terhadap bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah agar memudahkan rakyat Indonesia untuk mempelajari bahasa Jepang. Upaya tersebut ditunjukkan melalui kolom bahasa Jepang yang ada pada surat kabar berbahasa Indonesia dan daerah (Jawa). Contoh kolom bahasa Jepang tersebut terdapat pada surat kabar *Soeara Asia* tahun 1942 dan *Madoen Syuu* tahun 1944. (lihat gambar 15 dan gambar 16)

Jepang memberikan perhatian terhadap bahasa daerah di Indonesia yang beraneka ragam. Pada masa pendudukan Jepang dibentuk Perserikatan Penyelidik Bahasa Melayu dan Indonesia yang memiliki tugas untuk menyelidiki dan membuat standarisasi bahasa – bahasa daerah yang ada di Indonesia dan tanah Melayu.<sup>26</sup> Meskipun begitu lembaga ini tidak begitu menonjol karena jarang diberitakan dan kemungkinan tujuan pendiriannya agar Jepang dapat lebih mudah memobilisasi rakyat khususnya di daerah – daerah terpencil serta mempermudah menyebarkan bahasa Jepang.

Prosedur “Kodifikasi” yang dilakukan Jepang dengan membentuk komisi bahasa dan mengumpulkan ahli bahasa merupakan sebuah teknik propaganda. Menurut teori Decker mengenai teknik – teknik propaganda yang digunakan oleh Jepang, prosedur “Kodifikasi” termasuk ke dalam Teknik Mengatur Keadaan (Card Stacking). Teknik ini mengarahkan masyarakat kepada keadaan pemikiran yang dikehendaki. Teknik ini menerapkan seni mengelabui demi kepentingan kelompok, bangsa, perbuatan, kepercayaan atau cita – cita.<sup>27</sup> Jepang mendirikan Komisi Bahasa Indonesia untuk mengatur ahli – ahli bahasa Indonesia dan menghilangkan pengaruh – pengaruh bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia. Jepang juga berusaha mengarahkan lembaga ini untuk membantu Jepang dalam menyebarkan bahasa Jepang. Hal ini terbukti dengan adanya tokoh – tokoh Jepang dalam lembaga tersebut dan

“Kodifikasi” bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Prosedur “Pengembangan” adalah prosedur untuk membuat bahasa nasional dapat memenuhi kebutuhan masyarakat nasional di masa perkembangan teknologi dan literatur yang pesat. Tugas Komisi Bahasa Nasional pada prosedur “Pengembangan” yakni memperbaharui kosa kata bahasa Indonesia untuk mengungkapkan kata – kata modern. Sebelum masa pendudukan Jepang banyak ditemui penggunaan kosa kata Belanda untuk menjelaskan hal-hal yang berasal dari Barat. Meskipun begitu, prosedur “Pengembangan” yang dilakukan tidak bisa lepas sepenuhnya dari kosa kata bahasa asing. Ada beberapa kosa kata baru yang merupakan hasil serapan dari kosa kata asing.

Sebelum Komisi Bahasa Indonesia dibentuk, sebenarnya ada kelompok lain yang melakukan pengembangan bahasa Indonesia. Kelompok tersebut yaitu Balai Poestaka dengan majalahnya yang bernama *Pandji Poestaka*. Sejak tanggal 1 Agustus 1942 anggota – anggota kelompok ini bertemu di setiap hari sabtu dan dipimpin oleh Alisjahbana, Rasjad dan Soebadio serta jika perlu mengundang seorang pakar bidang ilmu untuk diminta pendapatnya. Sementara itu, *Pandji Poestaka* bertugas memuat daftar istilah yang telah disepakati. Pekerjaan peristilahan yang secara tidak resmi dilakukan oleh Balai Poestaka ini berhenti setelah KBI (Komisi Bahasa Indonesia) didirikan.<sup>28</sup> Usaha Balai Poestaka ini menghasilkan pedoman penerjemahan yang tidak dihasilkan oleh KBI dan diduga digunakan oleh KBI mengingat anggota – anggota Balai Poestaka turut berpartisipasi dalam kegiatan KBI.

#### “I. Bahasa Seoemoemnja di Balai Poestaka

1. Bahasa salinan hendaklah sama soeasannya dengan bahasa asing jang disalin itoe. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa soeasana ataoe atoeran jang khoesoes bagi bahasa Indonesia dilenyapkan.

2. Bahasa Indonesia jang dipakai ialah bahasa Indonesia zaman sekarang.

#### II. Kata – Kata

1. Sedapatnya dicari kata Indonesia jang soedah ada oentoek mengganti kata asing ataoe kalaoe tidak ada kata daerah jang moedah didjadikan kata Indonesia
2. Kalaoe kedoeanya tidak ada, oleh karena pengertian ataoe benda jang diperkatakan itoe tidak ada ataoe tidak diketahoei dalam lingoengan bahasa Indonesia, maka hendaklah diboeat kata baroe ataoe soesoenan baroe jang sesingkat – singkatnja.
3. Memboeat kata baroe itoe sedapat – dapatnja dengan djalan memperhatikan pengertian ataoe benda itoe sendiri.
4. Kalaoe tidak dapat kata dengan djalan 3, baroelah boleh menjalin arti kata asing itoe.

<sup>24</sup> Tjahaja, *Kepoatoesan Komisi Bahasa Indonesia I*, no. 13, th. III, Jumat 14 Januari 1944

<sup>25</sup> Jerome Samuel, *op cit*, hlm. 212

<sup>26</sup> Tjahaja, *Menjelidiki Bahasa – Bahasa Daerah di Indonesia dan Melajoe*, no. 26, th. III, Sabtu 29 Januari 1944

<sup>27</sup> Yundi Fitrah, *op cit*, hlm. 20

<sup>28</sup> Jerome Samuel, *op cit*, hlm.204

5. Kalaoe djalan 4 tidak djoega berhasil, baroelah boleh memakai kata asing
6. Dalam memilih kata – kata menoeroet 5, bahasa Arab, bahasa Sanskerta dan bahasa Nippon didahoeloeakan.
7. Kata Barat dipakai sedapat – dapatnja dengan memilih kata jang bersifat Internasional

### III. Ejaan

1. Oentoek sementara, sebeloem ada ketentoean baroe sedapat – dapatnja dipakai ejaan Van Ophuysen
2. Sedapat – dapatnja kata asing hendaklah ditoelis dengan edjaan dan boenji bahasa Indonesia.”<sup>29</sup>

Pedoman penerjemahan ini digunakan oleh Komisi Bahasa Indonesia untuk menjalankan prosedur “Pengembangan”. Contoh hasil prosedur “Pengembangan” tersebut dapat dilihat pada kolom bahasa Indonesia yang ada di dalam surat kabar yang terbit pada masa itu, yaitu :

- “Koersoes” dari kata asing “cursus” yang berarti kesempatan belajar
- “Lambang” dari kata asing “Symbool”
- “Nomor Boekti” dari kata asing “Bewijsnummer”<sup>30</sup>
- “Maart” menjadi “Maret”
- “Augustus” menjadi “Agoestoes”
- “October” menjadi “Oktober”
- “December” menjadi “Desember”
- “Kami tidak berbuat demikian, ‘althans’ saya tidak” menjadi “Kami tidak berbuat demikian, ‘yang sudah terang’ saya tidak” atau “itu perlu, ‘althans’ buat saya” menjadi “itu perlu, ‘hanya’ buat saya”<sup>31</sup>

Prosedur “Pengembangan” yang dilakukan oleh Komisi Bahasa Indonesia termasuk ke dalam Teknik Mengatur Keadaan (Card Stacking), sama seperti pada prosedur “Kodifikasi”. Jepang berusaha mengatur Komisi Bahasa Indonesia dalam prosedur “Pengembangan” agar melakukan hal yang diinginkan oleh Jepang. Hal tersebut dapat terlihat dalam pedoman penerjemahan yang digunakan oleh Komisi Bahasa Indonesia. Pada nomor 6 bagian Kata –Kata dalam mengartikan kata – kata asing jika tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, diutamakan menggunakan bahasa Arab, bahasa Sanskerta dan bahasa Jepang. Poin ini memberikan keuntungan bagi penyebaran bahasa Jepang.

Prosedur “Penyebaran” adalah prosedur yang dilakukan untuk menyebarkan bahasa yang sebelumnya telah dirancang. Berbeda dengan Aasen, Jepang menerapkan prosedur “Penyebaran” dengan tegas dan memaksa. Cara Jepang yang memaksakan penyebaran bahasa Indonesia ini mirip dengan cara yang diterapkan

oleh Jepang di negerinya sendiri. Jepang dengan tegas memerintahkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Meskipun penggunaan bahasa daerah tidak dilarang, penggunaan bahasa Indonesia tetap diharuskan dalam situasi-situasi formal.

Selain memaksa penggunaan bahasa Indonesia, Jepang juga menerapkan cara lain untuk melancarkan penyebaran bahasa Indonesia dan melenyapkan pengaruh bahasa Belanda. Cara tersebut yakni mengganti bermacam-macam nama Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Nama tersebut seperti nama wilayah atau jalan, nama rokok, nama toko, dan lain - lain. Contoh perubahan nama – nama peninggalan pada masa penjajahan Belanda yakni sebagai berikut :

- “Batavia” resmi diganti menjadi “Jakarta” pada 8 Desember 1942 saat perayaan Hari Pembangunan Asia Raya.<sup>32</sup>
- “Heerenstraat” menjadi “Embong Lodji”, “Marktstraat” menjadi “Embong sangar Ketjil”, “Kalverstraat” menjadi “Embong Kali Gembong”<sup>33</sup>
- “Volks en desascholen” menjadi “Sekolah Pertama”, “Volledige 2e Klasse School” dan segala macam sekolah sambungan “Vervolgscholen” menjadi “Sekolah Rakyat”<sup>34</sup>
- “Barbier” menjadi “tukang cukur”, “Schoenmaker” menjadi “tukang sepatu”, “Drukkerij” menjadi “percetakan”<sup>35</sup>

Jepang juga menarik buku-buku berbahasa Belanda dan sebagai gantinya menerbitkan buku-buku berbahasa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang tercatat bahwa komposisi terbitan – terbitan yakni terbitan berbahasa Indonesia (338 item atau 88,2%), bahasa Jawa (53 item atau 13,8%), bahasa Jepang (48 item atau 12,5%) dan bahasa Sunda (27 item atau 7%).<sup>36</sup> Tak kurang akal, Jepang mengumumkan sayembara-sayembara menggunakan bahasa Indonesia kepada masyarakat, seperti sayembara untuk membuat lagu tentang menabung dalam bahasa Indonesia sebagai propaganda Jepang dalam mengajak rakyat Indonesia agar giat menabung.<sup>37</sup> Jepang bahkan mengajarkan bahasa Indonesia pada prajurit – prajuritnya.<sup>38</sup>

Selain itu Komisi Bahasa Indonesia juga sangat giat menyelidiki dan menyebarkan kosa kata bahasa Indonesia yang baku. Kosa kata bahasa Indonesia yang baku tersebut disebarkan melalui surat kabar yang terbit pada masa itu. Usaha lain untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia yang baku adalah penyelenggaraan

<sup>32</sup> Kanpo, Makloemat : Nama ‘Batavia’ Diganti dengan ‘Jakarta’, no. 5, th. I, Desember 1942, hlm. 5

<sup>33</sup> Soeara Asia, Penggantian Nama – Nama Djalan, no. 19, th. 1, Senin 22 Juni 1942, hlm. 4

<sup>34</sup> Kanpo, Atoeran tentang Sekolah, no. 1, th. I, Agustus 1942, hlm. 33

<sup>35</sup> Kanpo, Makloemat : Tentang Nama – Nama Bahasa Belanda dan Palang Merah, no. 4, th. I, November 1942, hlm. 20

<sup>36</sup> Jerome Samuel, *op cit*, hlm. 202

<sup>37</sup> Asia Raja, Sajembara ‘Njanjian Menaboeng Oeang’ dalam Bahasa Indonesia, no. 25, th. IV, Senin 29 Januari 1945

<sup>38</sup> Soeara Asia, Serdadoe Nippon Mempeladjadi Bahasa Indonesia, no. 8, th. 1, Selasa 9 Juni 1942, hlm. 2

<sup>29</sup> Pandji Poestaka, 29 Agustus 1942, dalam Jerome Samuel, *op cit*, hlm. 205

<sup>30</sup> Tjahaja, Kata – Kata Baroe yang soedah Disahkan oleh Komisi Bahasa Indonesia, no. 16, th. III, Selasa 18 Januari 1944

<sup>31</sup> Pembangoen, Bahasa Indonesia, no. 200, th. X, Rabu 28 Oktober 1942, hlm. 3

kursus bahasa Indonesia. Kursus bahasa Indonesia itu salah satunya diselenggarakan oleh Balai Pengajaran.<sup>39</sup>

Bahasa Indonesia juga diajarkan pada kaum peranakan agar mereka tidak lagi menggunakan bahasa Belanda. Kursus bahasa Indonesia pada kaum peranakan itu diselenggarakan di *Kooa Bunka Kaikan* (Balai Budaya Asia Bangun) dan dipimpin oleh P.F. Dahler yang merupakan perwakilan kaum peranakan di dalam *Chuuu Sangi-In*. Kursus bahasa Indonesia ini diadakan sebanyak dua kali seminggu.<sup>40</sup>

Jepang juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai syarat penerimaan pegawai negeri. Pada pengumuman penerimaan pegawai negeri di majalah *Kanpo* dijelaskan bahwa pelamar harus menjawab sebisanya dengan bahasa Jepang, namun diperbolehkan menjawab dengan bahasa Indonesia jika belum menguasai bahasa Jepang.<sup>41</sup> Jepang menjadikan bahasa Indonesia sebagai syarat penerimaan murid di sekolah – sekolah. Dalam pengumuman penerimaan murid baru di sekolah – sekolah pada masa pendudukan Jepang, seperti *Jakarta Ika Daigaku*, dijelaskan bahwa ujian yang diselenggarakan mencakup ujian bahasa Indonesia selain ujian bahasa Nippon dan ilmu pengetahuan yang lain.<sup>42</sup>

Jepang menjadikan penguasaan bahasa Indonesia sebagai syarat kelulusan dalam ujian untuk menjadi guru sekolah rakyat. Dalam sebuah surat kabar dijelaskan bahwa untuk menambah jumlah guru, balatentara Jepang mengadakan ujian kesetaraan bagi masyarakat umum. Ujian tersebut dibagi menjadi 3 jenis yaitu ujian *Kokumin Gakkoo Seikyooiin* (Guru Biasa di Sekolah Rakyat), ujian *Kokumin Gakkoo Jiinkyooiin* (Guru Penolong di Sekolah Rakyat), dan ujian *Shoto Kokumin Gakko* (Guru Sekolah Pertama). Dijelaskan juga dalam ketiga jenis ujian tersebut terdapat ujian bahasa Indonesia, disamping ujian bahasa Jepang, bahasa daerah, dan ilmu pengetahuan yang lain.<sup>43</sup>

Selain memperluas penggunaan bahasa Indonesia, Jepang juga berusaha untuk menyebarkan bahasanya sendiri. Jepang melakukan berbagai cara untuk menyebarkan bahasa Jepang. Cara tersebut seperti berpidato tentang pentingnya bahasa Jepang, mempublikasikan pelajaran bahasa Jepang dalam surat kabar dan majalah, mengadakan kursus dan sekolah bahasa Jepang secara gratis dan menawarkan pekerjaan bagi masyarakat yang menguasai bahasa Jepang. Jepang juga mengadakan berbagai sayembara dalam bahasa Jepang seperti sayembara nama rokok, lagu perjuangan, dan lain - lain.

Jepang membuka sekolah bahasa Jepang untuk masyarakat umum secara gratis agar bahasa Jepang dapat meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Sekolah

bahasa Jepang ini diselenggarakan dibawah pengajaran guru – guru dari Jepang secara langsung.<sup>44</sup> Jepang juga menawarkan pekerjaan pada masyarakat yang menguasai bahasa Jepang atau telah menempuh pendidikan bahasa Jepang. Dengan cara ini masyarakat akan semakin berminat mempelajari bahasa Jepang dengan harapan akan mendapat pekerjaan dengan mudah.<sup>45</sup>

Jepang juga memberikan kursus bahasa Jepang pada kaum peranakan sehingga bahasa Jepang juga tersebar di kalangan kaum peranakan. Kursus bahasa Jepang ini diselenggarakan di *Kooa Bunka Kaikan* (Balai Budaya Asia Bangun) dan dipimpin oleh Nomachi dan Gijsburg. Kursus bahasa Jepang ini diadakan sebanyak dua kali seminggu.<sup>46</sup> Selain mengadakan sekolah dan kursus bahasa Jepang, pemerintah balatentara Jepang juga mengadakan pelajaran bahasa Jepang di sekolah – sekolah yang sudah ada seperti di sekolah Taman Siswa.<sup>47</sup>

Kursus bahasa Jepang ini tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, tapi juga diajarkan pada pegawai negeri di kantor-kantor pemerintahan. Jepang mengambil beberapa perwakilan para pegawai untuk mengikuti kursus bahasa Jepang.<sup>48</sup> Jepang juga mengadakan perlombaan bahasa Jepang di kalangan pegawai pemerintahan, seperti yang diadakan di Cirebon. Perlombaan tersebut berupa perlombaan berpidato menggunakan bahasa Jepang.<sup>49</sup> Jepang berharap agar penggunaan bahasa Jepang dikalangan pegawai pemerintah semakin meluas dengan usaha ini.

Jepang kemudian menjadikan bahasa Jepang sebagai syarat penerimaan pegawai negeri dan guru. Pada penerimaan pegawai negeri, Jepang menganjurkan penggunaan bahasa Jepang dalam kegiatan tersebut. Meskipun para peserta diperbolehkan menjawab sebisanya dalam bahasa Jepang dan diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia jika tidak menguasai bahasa Jepang, namun dapat dipahami bahwa penguasaan bahasa Jepang menjadi nilai tambah dalam penerimaan pegawai negeri.<sup>50</sup> Dalam penerimaan calon guru sekolah rakyat, para calon guru harus menempuh ujian bahasa Jepang agar dapat diterima sebagai guru di sekolah rakyat, disamping ujian bahasa Indonesia, bahasa daerah dan ujian ilmu pengetahuan yang lain.<sup>51</sup>

<sup>44</sup> *Kanpo, Makloemat : Tentang Sekolah Bahasa Nippon*, no. 3, th. I, Oktober 1942, hlm. 12

<sup>45</sup> *Kanpo, Tentang Panggilan Bekas Moerid Nippon-go Gakkoo*, no. 7, th. II, Februari 1943, hlm. 20

<sup>46</sup> *Asia Raja, Kaoem Indo Giat Beladjar Bahasa Indonesia*, no. 4, th. IV, Kamis 4 Januari 1945

<sup>47</sup> *Soeara Asia, Pergoeroean Taman Siswa : Dapat Peladjaran Bahasa serta Olah Raga dari Goeroe – Goeroe Nippon*, no. 17, th. 1, Jumat 19 Juni 1942, hlm. 3

<sup>48</sup> *Soeara Asia, Koersoes Bahasa Nippon*, no. 14, th. 1, Selasa 16 Juni 1942, hlm. 3

<sup>49</sup> *Asia Raja, Pegawai Tjirebon Shuu dan Bahasa Nippon*, no. 26, th. IV, Selasa 30 Januari 1945

<sup>50</sup> *Kanpo, Tentang Mengadakan Kesempatan kepada Pendoedoek Asli oentoek Diangkat menjadi Pegawai Negeri*, no. 7, th. II, Februari 1943, hlm. 4-5

<sup>51</sup> *Asia Raja, Oedjian oentoek menjadi Goeroe Sekolah Rakjat dengan Tjara Loear Biasa*, no. 10, th. IV, Kamis 11 Januari 1945

<sup>39</sup> *Tjahaja, Koersoes Bahasa Indonesia*, no. 24, th. III, Kamis 27 Januari 1944

<sup>40</sup> *Asia Raja, Kaoem Indo Giat Beladjar Bahasa Indonesia*, no. 4, th. IV, Kamis 4 Januari 1945

<sup>41</sup> *Kanpo, Tentang Mengadakan Kesempatan kepada Pendoedoek Asli oentoek Diangkat menjadi Pegawai Negeri*, no. 7, th. II, Februari 1943, hlm. 4-5

<sup>42</sup> *Tjahaja, Penerimaan Peladjar – Peladjar Baroe Djakarta Ika Daigaku*, no. 22, th. III, Selasa 25 Januari 1944

<sup>43</sup> *Asia Raja, Oedjian oentoek menjadi Goeroe Sekolah Rakjat dengan Tjara Loear Biasa*, no. 10, th. IV, Kamis 11 Januari 1945

Jepang juga berusaha menambah antusiasme masyarakat Indonesia untuk mempelajari bahasa Jepang melalui perlombaan dan sayembara. Dengan iming – iming hadiah, Jepang berharap masyarakat Indonesia menjadi semakin bersemangat untuk mempelajari bahasa Jepang. Perlombaan tersebut misalnya berupa percakapan dan mengarang dalam bahasa Jepang, serta menyanyikan lagu – lagu Jepang.<sup>52</sup>

Penggantian nama – nama Belanda atau Barat tidak ke dalam bahasa Indonesia saja, namun juga ke dalam bahasa Jepang. Contoh penggantian nama – nama ke dalam bahasa Jepang yakni :

- Rokok “Maskot” menjadi rokok “Kooa” yang berarti ‘Asia Bangun’
- Rokok “Davros” menjadi rokok “Mizoeho” yang berarti ‘Padi’
- Rokok “Double Ace” menjadi rokok “Sekidoo” yang berarti ‘Khatulistiwa’<sup>53</sup>
- “Oranje Boulevard” menjadi “Jalan Raya Syoowa”, “Van Heutz Boulevard” menjadi “Jalan Imamura”, “Nassau Boulevard” menjadi “Jalan Raya Meiji”<sup>54</sup>

Tindakan Jepang ini rupanya didorong oleh keinginan Jepang untuk menjadikan bahasa Jepang sebagai bahasa perhubungan dalam lingkungan Asia Raya. Hal ini tersirat dalam sebuah surat kabar yang mengungkapkan bahwa bahasa Jepang sangat penting untuk dikuasai agar dapat menghubungkan dan menyatukan kawasan Asia Timur Raya seperti Birma, Filipina dan Indonesia. Selain itu posisi Jepang sebagai pemimpin dan Tokyo sebagai pusatnya menjadikan bahasa Jepang sebagai bahasa perhubungan yang pantas, sehingga sudah sepantasnya masyarakat harus giat mempelajari bahasa Jepang untuk mempererat persatuan Asia Timur Raya.<sup>55</sup> Tentu saja Jepang juga memiliki tujuan lain yang tersirat dalam propagandanya ini yakni menyebarkan pengaruhnya ke dalam semua daerah jajahannya.

Prosedur Penyebaran ternyata juga terjadi pada bahasa daerah. Selain memperbolehkan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari – hari dan menjadikan bahasa daerah sebagai alat untuk menyebarkan bahasa Jepang, pemerintah balatentara Jepang juga menjadikan bahasa daerah sebagai alat propaganda. Penggunaan bahasa daerah sebagai alat propaganda salah satunya terdapat dalam bentuk sandiwara. Dalam sebuah surat kabar berbahasa daerah, diadakan sayembara membuat naskah sandiwara untuk daerah Madiun dan sekitarnya. Tertulis bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa, namun harus ditulis dalam huruf latin. Naskah sandiwara yang dikirim harus mengandung semangat perjuangan, kemerdekaan, menambah hasil bumi dan menabung. Naskah – naskah

sandiwara tersebut kemudian diperiksa oleh Madioen *Shuuchoo Hookookai* dan Pusat Kesenian Madiun. Sayembara ini juga disertai hadiah dalam bentuk uang untuk menambah antusiasme masyarakat.<sup>56</sup>

Jepang juga menjadikan bahasa daerah sebagai syarat penerimaan menjadi guru sekolah rakyat. Dijelaskan bahwa para calon guru harus menempuh ujian bahasa daerah, disamping menempuh ujian bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan yang lain.<sup>57</sup> Hal ini karena banyaknya anak – anak usia sekolah yang belum menguasai bahasa Jepang dan bahasa Indonesia yang baku. Guru – guru sekolah rakyat perlu menguasai bahasa daerah agar dapat berinteraksi dengan murid – murid tersebut, khususnya di daerah – daerah terpencil.

Prosedur “Penyebaran” ini termasuk kedalam Teknik Mengatur Keadaan (Card Stacking), sama seperti prosedur “Kodifikasi” dan “Elaborasi”. Jepang berusaha mengatur pemikiran dan kehidupan bangsa Indonesia agar sesuai dengan kehendak Jepang dengan menyebarkan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jepang menyebarkan bahasa ini dengan melalui berbagai cara seperti sayembara, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dan Jepang, penggantian nama – nama Belanda, dan lain – lain. Dengan begitu, bahasa Belanda akan lebih cepat dilupakan oleh bangsa Indonesia dan hilang kedudukannya bersamaan dengan pengaruh Barat di Indonesia sehingga Jepang dapat lebih leluasa menancapkan pengaruhnya.

### Dampak Language Planning Bahasa Indonesia

Program *Language Planning* yang diterapkan oleh Jepang merupakan sebuah program yang membawa revolusi terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Program ini membawa berbagai dampak pada masyarakat di Indonesia mengingat berkat program ini penggunaan bahasa Indonesia yang baku semakin meluas di berbagai kalangan. Secara garis besar, dampak yang terjadi akibat dari kebijakan *Language Planning* pada masa pendudukan Jepang dapat dibedakan menjadi dua yakni dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari *Language Planning* di Indonesia sangat beragam. Melalui *Language Planning*, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia secara nyata. Tidak seperti pada masa kolonial, bahasa Indonesia digunakan dalam setiap kegiatan – kegiatan formal hampir di seluruh kalangan. Salah satunya adalah pada urusan pemerintahan. Pemerintah Balatentara Jepang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia pada pegawai – pegawai negeri. Selain itu bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai syarat penerimaan murid dan menjadi mata pelajaran di sekolah.

Berkat *Language Planning* ini kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya bahasa

<sup>52</sup> Kanpo, *Berita Gunseikanbu : Tentang pertandingan mempergoenakan bahasa dan Njanjian Nippon*, no. 7, th. II, Febuari 1943, hlm. 11-12

<sup>53</sup> Kanpo, *Mengganti Nama – Nama Rokok*, no. 6, th. II, Januari 1943, hlm. 14

<sup>54</sup> Tjahaja, *Penggantian Nama – Nama Jalan*, no. 24, th. III, Kamis 27 Januari 1944

<sup>55</sup> Sinar Baroe, *Bahasa Nippon*, no. 424, th. II, Senin 22 November 1943

<sup>56</sup> Madioen Syuu, *Sajembara Membuat Lakon Sandiwara Djawa*, no. 20, th. 2, Selasa 30 Januari 1945, hlm. 1

<sup>57</sup> Asia Raja, *Oedjian oentoek mendjadi Goeroe Sekolah Rakjat dengan Tjara Loear Biasa*, no. 10, th. IV, Kamis 11 Januari 1945

Indonesia semakin tinggi. Berbagai tulisan di surat kabar berbicara tentang pentingnya bahasa Indonesia. Armijn Pane dalam sebuah surat kabar menulis tentang pentingnya penguasaan bahasa Indonesia yang baku dan ujian bahasa bagi para pegawai.

“Mereka loepa, oleh bahasa jang tidak teratoer, pekerdjaan dapat katjaoe. Orang moedah mendapat salah paham. Masjarakat jang teratoer perloe kepada bahasa yang teratoer. Memang baik sekali sikap jang diperlihatkan oleh soeatoe kantor jang soedah memasang advertensi dalam soeatoe soerat kabar meminta pegawai. Pegawai itoe mesti paham bahasa Indonesia. Hal itoe mendjadi soeatoe sjarat jang penting. Artinja kalaoe tidak paham, dia tidak akan diterima. Kita tidak heran, kalaoe sikap jang begitoe akan ditjontoh djoega oleh kantor – kantor lain. Tetapi bagi pegawai jang soedah bekerdja dapat poela diadakan atoeran semacam itoe. Sekarang mereka diberi kesempatan oentoe memperbaiki bahasa Indonesianja, misalnja dalam waktoe 6 boelan. Kemoedian akan dioedji dalam hal bahasa. Siapa jang tidak menang, dianggap tidak tjakap.”<sup>58</sup>

Kesadaran terhadap pentingnya bahasa Indonesia tidak hanya tumbuh di kalangan tokoh – tokoh pergerakan saja, namun tumbuh di kalangan umum. Hal ini dapat terlihat dari tulisan – tulisan terbuka yang dimuat di surat kabar pada masa pendudukan Jepang. Berbagai tulisan dari kalangan umum di surat kabar banyak yang menjelaskan tentang pentingnya bahasa Indonesia. Salah satunya adalah tulisan dari seseorang yang bernama Moh. Subedjo dari Bondowoso. Dia berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki tujuh manfaat, yaitu : 1) menjauhkan rasa tinggi hati dan mendekatkan rasa cinta bangsa; 2) memperdalam rasa persatuan (kebangsaan) Indonesia; 3) mempertinggi derajat bangsa Indonesia; 4) melaksanakan kemerdekaan Indonesia; 5) menjauhkan rasa malu (takut) dan membuang rasa lemah; 6) mempertinggi kedaulatan Indonesia merdeka di kemudian hari; 7) memperlihatkan ke negeri luar adanya suatu bangsa Indonesia dalam dunia ini.<sup>59</sup>

Semakin tingginya kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia, membuat rakyat Indonesia semakin antusias untuk mempelajarinya. Terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang bagus. Bahasa Indonesia tak hanya diajarkan di sekolah – sekolah saja, kursus bahasa Indonesia pun diadakan untuk memberikan kesempatan bagi kalangan non – pelajar untuk dapat menguasai bahasa Indonesia yang baku. Kursus bahasa Indonesia itu salah satunya diselenggarakan oleh Balai Pengajaran. Dijelaskan pula bahwa peserta yang mengikuti kursus tersebut sangat banyak hingga Balai Pengajaran harus

menyediakan dua buah kelas agar dapat menampung para peserta kursus.<sup>60</sup>

Kebijakan *language Planning* Jepang juga memberikan dampak positif dalam dunia sastra Indonesia. Kebebasan penggunaan bahasa Indonesia semakin mematangkan sastrawan – sastrawan dalam karya sastra berbahasa Indonesia. Salah satunya adalah Chairil Anwar yang selalu melakukan percobaan dengan kata – kata baru. Kata – katanya yang terkenal adalah prosa yang dia tujukan pada H.B. Jassin pada tahun 1944, yaitu : “Prosaku, puisi juga, dalamnya ‘tiap kata’ akan kugali – korek sedalamnya, hingga ke *kernwood*, ke *kernbeeld*.”<sup>61</sup>

Bahasa – bahasa sajak yang digunakan Chairil Anwar bukan lagi bahasa buku yang terpisah dari kehidupan, namun bahasa sehari – hari yang sudah familiar. Chairil Anwar selalu berusaha memilih kata – kata yang akan digunakan dengan cermat agar sajak buaatannya dapat menggambarkan kehidupan dengan jelas.<sup>62</sup> Selain Chairil Anwar, pada masa pendudukan Jepang juga muncul penyair – penyair baru seperti Rosihan Anwar, Usmar Ismail, Amal Hamzah, Anas Ma’ruf, M.S. Ashar, serta dua penyair wanita yaitu Maria Amin dan Nursjamsu.

Selain syair, pada masa pendudukan Jepang juga terjadi perkembangan dalam hal cerpen, drama dan film. Berbagai karya cerpen, drama dan film banyak bermunculan dalam bahasa Indonesia. Perkembangan yang terjadi ini selain karena kebebasan penggunaan bahasa Indonesia, juga disebabkan oleh usaha Jepang dalam mengumpulkan seniman – seniman Indonesia untuk membuat lagu, sajak, sandiwara, film, dan sebagainya demi propaganda Jepang. Hal – hal buruk yang terjadi pada rakyat Indonesia saat pendudukan Jepang juga mendorong para seniman untuk mengekspresikannya ke dalam karya – karyanya yang berbahasa Indonesia meskipun secara diam – diam.

Kesadaran yang tinggi terhadap bahasa nasional di kalangan rakyat Indonesia mendorong kematangan mental rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Terlebih lagi melalui propaganda – propaganda Jepang tentang janji – janji kemerdekaannya dan usaha – usaha tokoh – tokoh pergerakan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka pun semakin besar. Meskipun banyak terjadi eksploitasi dan kekejaman yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia, hal tersebut tidak menyurutkan semangat bangsa Indonesia. Berkat semua itu, bangsa Indonesia memiliki keberanian dan semangat yang besar dalam meraih kemerdekaannya yang dibuktikan dalam perlawanan bangsa Indonesia terhadap pasukan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia saat Jepang menyerah kepada sekutu.

Disamping dampak – dampak positif yang dibawa oleh *Language Planning*, juga terdapat dampak negatif yang dibawa oleh kebijakan Jepang ini. Berbagai macam

<sup>58</sup> Soeara Asia, Soeara Pers : Oedjian Bahasa, no. 17, th. 1, Jumat 19 Juni 1942, hlm. 3

<sup>59</sup> Asia Raja, Bahasa : Dasar (Fundament) Kemerdekaan Negara, no. 98, th. IV, Selasa 24 April 1945

<sup>60</sup> Tjahaja, Koersoes Bahasa Indonesia, no. 24, th. III, Kamis 27 Januari 1944

<sup>61</sup> Ajip Rosidi, 1969, *Ichtisar Sedjarah Sastra Indonesia*, Bandung : Binatjpta, hlm. 82

<sup>62</sup> Ajip Rosidi, *loc cit*

dampak negatif muncul sebagai akibat dari kebijakan *Language Planning* Jepang. Dampak negatif tersebut seperti munculnya perasaan – perasaan negatif terhadap bahasa daerah di masyarakat. Adanya perasaan negatif terhadap bahasa daerah di masyarakat ini dibuktikan dengan tulisan – tulisan terbuka yang terdapat di koran.

Salah satunya adalah tulisan dari seseorang yang bernama Moh. Subedjo dari Bondowoso yang sebelumnya menuliskan tujuh manfaat penggunaan bahasa Indonesia menurut pendapatnya. Dia menulis bahwa dia merasa prihatin karena masih banyak rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa daerah sehari – hari. Menurutnya penggunaan bahasa daerah membuat masyarakat Indonesia menjadi terbelakang dan sulit bersatu karena adanya perbedaan bahasa daerah serta perasaan yang ingin meneguhkan bahasa daerahnya masing – masing. Selain itu bahasa daerah digunakan oleh Belanda untuk menginjak – injak derajat bangsa Indonesia. Dia mencontohkan dengan kejadian di Sidoarjo tahun 1933 bagaimana pejabat – pejabat pribumi diharuskan untuk menggunakan bahasa Jawa Krama jika berbicara pada Asisten Residen yang merupakan bangsa Belanda. Sebaliknya Asisten Residen tersebut berbicara menggunakan bahasa Jawa Ngoko kepada pejabat – pejabat pribumi tersebut.<sup>63</sup>

Perasaan negatif terhadap bahasa daerah ini muncul karena rasa nasionalisme yang sangat tinggi yang muncul pada masa itu akibat dari banyaknya propaganda – propaganda tentang bahasa Indonesia, baik yang berasal dari Jepang atau bangsa Indonesia sendiri. Pesatnya pertumbuhan rasa nasionalisme yang tidak sebanding dengan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan budaya tanah air dapat menimbulkan paham ultranasionalisme atau fasisme dalam diri masyarakat.

Kebijakan *Language Planning* bahasa Indonesia juga dimanfaatkan oleh Jepang untuk melakukan propaganda – propaganda kepada bangsa Indonesia. Berbagai bentuk propaganda dilakukan Jepang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Akibatnya Jepang dapat memobilisasi dan mengeksploitasi rakyat Indonesia dengan lebih mudah. Banyak rakyat Indonesia yang menderita karena eksploitasi Jepang yang tidak manusiawi.

Selain itu kebijakan ini juga menambah kebencian rakyat pribumi terhadap bangsa Belanda dan kaum peranakan yang ada di Indonesia. Saat Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia, Jepang juga menyebarkan keburukan – keburukan bangsa Belanda pada rakyat pribumi Indonesia agar rakyat pribumi tidak lagi memakai bahasa Belanda. Akibatnya nasib warga Belanda dan peranakan menjadi sangat menyedihkan karena selain mendapat perlakuan kejam dari bangsa Jepang, mereka juga dibenci oleh rakyat pribumi. Tidak jarang mereka mendapat perlakuan kasar dari rakyat pribumi seperti perampokan atau penghinaan.

## PENUTUP

Kedudukan bahasa Indonesia tetap berada di bawah bahasa Belanda yang merupakan bahasa pemerintah hingga kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang menerapkan kebijakan anti Barat di Indonesia. Salah satu dari kebijakan tersebut yaitu politik bahasa yang berupa pelarangan bahasa Belanda. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dalam berbagai hal dan mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia. Jepang juga berusaha menyebarkan bahasa Jepang di Indonesia dengan berbagai cara. Alasan Jepang menerapkan politik bahasa ini karena Jepang ingin menghilangkan pengaruh Belanda di Indonesia. Selain itu dengan mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia akan memudahkan Jepang dalam berkomunikasi dengan rakyat Indonesia yang memiliki beraneka ragam bahasa lokal dan memobilisasi mereka demi kepentingan perang Jepang.

Politik bahasa yang diterapkan oleh Jepang ini merupakan suatu kebijakan *Language Planning*. *Language Planning* adalah suatu aktivitas mempersiapkan sebuah ortografi, tata bahasa dan kamus yang normatif untuk panduan para penulis dan pembicara dalam suatu komunitas bahasa yang non – homogen. *Language Planning* dijalankan oleh pemerintah ketika terdapat suatu masalah linguistik dalam negara tersebut. Prosedur *Language Planning* dibedakan menjadi empat yakni Seleksi, Kodifikasi, Pengembangan dan Penyebaran.

Pada prosedur “Seleksi”, Jepang memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan. Tindakan Jepang ini masuk kedalam teknik propaganda “Peralihan”. Jepang menggunakan bahasa Indonesia sebagai simbol untuk mengobarkan rasa nasionalisme dan memobilisasi bangsa Indonesia. Pada prosedur “Kodifikasi”, Jepang membentuk Komisi Bahasa Indonesia untuk melakukan pengembangan dan pembinaan bahasa. Tindakan ini masuk ke dalam teknik propaganda “Mengatur Keadaan”. Jepang membentuk lembaga tersebut agar dapat mengendalikan lembaga tersebut dan anggota – anggotanya sehingga sesuai dengan keinginan Jepang.

Pada prosedur “Pengembangan”, Komisi Bahasa Indonesia melakukan pengembangan peristilahan dalam bahasa Indonesia. Tindakan ini masuk ke dalam teknik propaganda “Mengatur Keadaan”, meskipun hal ini dilakukan oleh Komisi Bahasa Indonesia karena Jepang yang mengendalikan lembaga tersebut. Pada prosedur “Penyebaran”, Jepang menyebarkan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Tindakan ini masuk ke dalam teknik propaganda “Mengatur Keadaan”, karena Jepang berusaha mengatur penggunaan bahasa di Indonesia sehingga bahasa Belanda segera hilang kedudukannya. Melalui prosedur – prosedur tersebut dapat diketahui bahwa politik bahasa yang dijalankan oleh Jepang merupakan bagian dari propaganda Jepang secara tidak langsung. Politik bahasa ini memungkinkan Jepang untuk mengendalikan bangsa Indonesia dengan mudah dan menyembunyikan tujuan propaganda Jepang yang sebenarnya

<sup>63</sup> Asia Raja, *Bahasa : Dasar (Fundament) Kemerdekaan Negara*, no. 98, th. IV, Selasa 24 April 1945

Kebijakan *Language Planning* yang dilakukan oleh Jepang membawa berbagai dampak pada bangsa Indonesia. Dampak tersebut terbagi menjadi dua yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif kebijakan tersebut yaitu menguatnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kesadaran masyarakat terhadap bahasa nasional menjadi semakin tinggi, semakin banyaknya karya – karya seni dan sastra dalam bahasa Indonesia dan memantapkan mental bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Sedangkan dampak negatif kebijakan tersebut yakni timbulnya perasaan – perasaan negatif terhadap bahasa daerah, semakin banyaknya eksploitasi yang dilakukan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia dan semakin tingginya kebencian rakyat pribumi kepada bangsa Belanda di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Kanpo

Kanpo. Agustus 1942. *Atoeran tentang Sekolah*. no. 1. th. I

Kanpo. Oktober 1942. *Makloemat tentang Larangan Bitjara dengan Tilpon dengan Bahasa Inggris dan Belanda*. no. 3. th. I

Kanpo. Oktober 1942. *Makloemat : Tentang Sekolah Bahasa Nippon*. no. 3. th. I

Kanpo. November 1942. *Makloemat : Tentang Nama – Nama Bahasa Belanda dan Palang Merah*. no. 4. th. I

Kanpo. Desember 1942. *Makloemat Kantor Pos*. no. 5. th. I

Kanpo. Desember 1942. *Makloemat : Nama 'Batavia' Diganti dengan 'Djakarta'*. no. 5. th. I

Kanpo. Desember 1942. *Makloemat : Tentang Menyempoernakan Bahasa Indonesia*. no. 5. th. I

Kanpo. Januari 1943. *Mengganti Nama – Nama Rokok*. no. 6. th. II.

Kanpo. Februari 1943. *Berita Gunseikanbu : Tentang pertandingan mempergoenakan bahasa dan Njanjian Nippon*. no. 7. th. II.

Kanpo. Februari 1943. *Makloemat : Tentang Memakainja Bahasa Nippon atau Indonesia*. no. 7. th. II

Kanpo. Februari 1943. *Tentang Mengadakan Kesempatan kepada Pendoedoek Asli oentoek Diangkat menjadi Pegawai Negeri*. no. 7. th. II

Kanpo. Februari 1943. *Tentang Panggilan Bekas Moerid Nippon-go Gakkoo*. no. 7. th. II

Kanpo. Maret 1943. *Makloemat : Tentang Mereka yang Menyeroepai tanda Moesoeh, dan sebagainya*. no. 8. th. II

### Sumber Surat Kabar

Asia Raja. Kamis 4 Januari 1945. *Kaoem Indo Giat Beladjar Bahasa Indonesia*, no. 4, th. IV

Asia Raja. Kamis 11 Januari 1945. *Oedjian oentoek menjadi Goeroe Sekolah Rakjat dengan Tjara Loear Biasa*. no. 10. th. IV

Asia Raja. Senin 29 Januari 1945. *Sajembara 'Njanjian Menaboeng Oeang' dalam Bahasa Indonesia*. no. 25. th. IV

Asia Raja. Selasa 30 Januari 1945. *Pegawai Tjirebon Shuu dan Bahasa Nippon*. no. 26. th. IV

Asia Raja. Kamis 15 Februari 1945. *Samboetan Anggota-Anggota Baroe Chuo Sangi-In*. no. 40. th. IV

Asia Raja. Selasa 24 April 1945. *Bahasa : Dasar (Fundament) Kemerdekaan Negara*. no. 98. th. IV

Madioen Syuu. Selasa 30 Januari 1945. *Sajembara Membuat Lakon Sandiwara Djawa*. no. 20. th. 2

Pembangoen. Rabu 21 Oktober 1942. *Komisi Bahasa Indonesia*. no. 104. th. X

Pembangoen. Rabu 28 Oktober 1942. *Bahasa Indonesia*. no. 200. th. X

Sinar Baroe. Senin 30 Agustus 1943. *Menghidoeplan Bahasa Tagalog di Kalangan Rakjat Pilipina*. no. 354. th. II

Sinar Baroe. Senin 22 November 1943. *Bahasa Nippon*. no. 424. th. II

Soeara Asia. Selasa 9 Juni 1942. *Serdadoe Nippon Mempeladjar Bahasa Indonesia*. no. 8. th. 1

Soeara Asia. Selasa 16 Juni 1942. *Koersoes Bahasa Nippon*. no. 14. th. 1

Soeara Asia. Jumat 19 Juni 1942. *Pergoeroean Taman Siswa : Dapat Peladjaran Bahasa serta Olah Raga dari Goeroe – Goeroe Nippon*. no. 17. th. 1

Soeara Asia. Jumat 19 Juni 1942. *Soeara Pers : Oedjian Bahasa*. no. 17. th. 1

Soeara Asia. Senin 22 Juni 1942. *Penggantian Nama – Nama Djalan*. no. 19. th. 1

Soeara Asia. Sabtu 4 Juli 1942. *Bahasa Indonesia di Kantor – Kantor Negeri*. no. 30. th. 1

Tjahaja. Jumat 14 Januari 1944. *Kepoatoesan Komisi Bahasa Indonesia I*. no. 13. th. III

Tjahaja. Selasa 18 Januari 1944. *Kata – Kata Baroe yang soedah Disahkan oleh Komisi Bahasa Indonesia*. no. 16. th. III

Tjahaja. Selasa 25 Januari 1944. *Penerimaan Peladjar – Peladjar Baroe Djakarta Ika Daigaku*. no. 22 th. III

Tjahaja. Kamis 27 Januari 1944. *Koersoes Bahasa Indonesia*. no. 24 th. III

Tjahaja. Kamis 27 Januari 1944. *Penggantian Nama – Nama Jalan*. no. 24. th. III

Tjahaja. Sabtu 29 Januari 1944. *Menjelidiki Bahasa – Bahasa Daerah di Indonesia dan Melajoe*. no. 26. th. III

Tjahaja. Senin 31 Januari 1944. *Persidangan Kedoea Tyuuoo Sangi-In*. no. 28. th. III

#### Sumber Buku

Alisjahbana, S. Takdir. 1957. *Dari Perdjjuangan Dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Rakyat

De Jong, L. 1987. *Pendudukan Jepang di Indonesia : Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintahan Belanda*. Jakarta : Kesaint Blanc

De Jong, L. 2002. *The Collapse of A Colonial Society : The Dutch in Indonesia during the Second World War*. Leiden : KITLV Press

Haugen, Einar. 1972. *The Ecology of Language*. California : Stanford University Press

Jassin, H.B. 1955. *Kesusasteraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Essay*. Jakarta : Gunung Agung

Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa University Press

Ricklefs, M.C. 2010. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta : Serambi.

Rosidi, Ajip. 1969. *Ichtisar Sedjarah Sastra Indonesia*. Bandung : Binatjipta

Samuel, Jerome. 2008. *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia

Suyono, Capt. R. P. 2005. *Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial : Penelusuran Kepustakaan Sejarah*. Jakarta : Grasindo

Widati, Sri, dkk. 2001. *Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern Periode Pra – Kemerdekaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

#### Sumber Tesis

Fitrah, Yundi. 1997. *Propaganda Jepang dalam Cerpen-Cerpen Majalah Djawa Baroe*. Depok : Prodi Ilmu Susastra Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya UI.